

UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAKPA/B)AUDITED

**BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI**

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022

Gedung Bappebti Lantai 3-7

Jl Kramat Raya No. 172

Jakarta 10430

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran /Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Tingkat Satuan Kerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2022 *Audited* ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 31 Mei 2023
Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan,



DIDID NOORDIATMOKO
NIP. 19631108 198403 1 001

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	24
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	34
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	41
F. Pengungkapan Penting Lainnya	43
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)
Kementerian Perdagangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2022 Tingkat Satuan Kerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (**Bappebti**) Kementerian Perdagangan *Audited* yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran (**LRA**), **Neraca**, Laporan Operasional (**LO**), Laporan Perubahan Ekuitas (**LPE**), dan Catatan atas Laporan Keuangan (**CaLK**), sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Tahunan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (**SPI**) yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (**SAP**).

Jakarta, 31 Mei 2023
Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan,



DIDID NOORDIATMOKO
NIP. 19631108 198403 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 1.515.141.487,- atau mencapai 137,74 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.100.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp. 47.851.419.342,- atau mencapai 97,82 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 48.919.597.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp 15.166.490.857,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 2.774.818.886,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 2.155.415.237,- ; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 10.236.256.734,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp 15.166.490.857,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 1.218.222.356,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 79.293.572.967,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(78.075.350.611,-). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing defisit/Surplus sebesar Rp275.308.955 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(77.800.041.656,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp46.629.533.658,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(77.800.041.656,-). kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp721.000 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 46.336.277.855,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp 15.166.490.857,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022		% thd Angg	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		1.100.000.000	1.515.141.487	137,74	752.974.850
JUMLAH PENDAPATAN		1.100.000.000	1.515.141.487	137,74	752.974.850
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	23.757.201.000	23.155.035.495	97,47	20.034.540.963
Belanja Barang	B.4	24.509.602.000	24.046.682.207	98,11	25.744.172.305
Belanja Modal		652.794.000	649.701.640	99,53	2.139.746.475
Jumlah Belanja Operasi		48.919.597.000	47.851.419.342	97,82	47.918.459.743
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.6	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	377.794.000	377.544.140	99,93	857.512.475
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	-	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	-	-	-	-
Belanja Modal lainnya	B.10	275.000.000	272.157.500	98,97	1.282.234.000
Jumlah Belanja Modal		652.794.000	649.701.640	99,53	2.139.746.475
JUMLAH BELANJA		48.919.597.000	47.851.419.342	97,82	47.918.459.743

II. NERACA

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam
Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.4	-	-
Piutang Bukan Pajak		13.014.544	21.610.176
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak		-	(589.275)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.5	13.014.544	21.020.901
Persediaan	C.6	2.761.804.342	33.660.403.996
Jumlah Aset Lancar		2.774.818.886	33.681.424.897
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.7	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.8	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.9	-	-
Peralatan dan Mesin	C.10	21.833.905.248	22.243.883.108
Gedung dan Bangunan	C.11	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.12	475.090.000	475.090.000
Aset Tetap Lainnya	C.13	146.055.961	146.055.961
Konstruksi dalam pengerjaan	C.14	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.15	(20.299.635.972)	(19.888.043.721)
Jumlah Aset Tetap		2.155.415.237	2.976.985.348
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.16	13.668.664.870	13.396.507.370
Aset Lain-Lain	C.17	5.943.948.760	5.978.264.760
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.18	(9.376.356.896)	(9.403.648.717)
Jumlah Aset Lainnya		10.236.256.734	9.971.123.413
JUMLAH ASET		15.166.490.857	46.629.533.658
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.19	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.20	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.21	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.22	15.166.490.857	46.629.533.658
JUMLAH EKUITAS		15.166.490.857	46.629.533.658
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		15.166.490.857	46.629.533.658

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.218.222.356	642.111.897
JUMLAH PENDAPATAN		1.218.222.356	642.111.897
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	23.142.020.951	20.023.864.035
Beban Persediaan	D.3	1.847.461.529	2.620.920.484
Beban Barang dan Jasa	D.4	12.423.535.059	14.685.658.077
Beban Pemeliharaan	D.5	854.071.284	1.881.412.609
Beban Perjalanan Dinas	D.6	9.263.361.117	6.598.117.955
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	30.557.573.872	9.854.479.657
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.206.138.430	4.798.280.605
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(589.275)	(1.312)
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		79.293.572.967	60.462.732.110
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(78.075.350.611)	(59.820.620.213)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		33.699.999	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		241.608.956	105.145.449
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		275.308.955	105.145.449
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(77.800.041.656)	(59.715.474.764)
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(77.800.041.656)	(59.715.474.764)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	46.629.533.658	58.909.339.529
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(77.800.041.656)	(59.715.474.764)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	721.000	364.000
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2		
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4.3	721.000	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.4.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI LAIN-LAIN	E.4.5		
LAIN-LAIN	E.4.6	-	364.000
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	46.336.277.855	47.435.304.893
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(31.463.042.801)	(12.279.805.871)
EKUITAS AKHIR	E.6	15.166.490.857	46.629.533.658

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengawas Perdagangan

Berjangka Komoditi

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan salah satu entitas dibawah Kementerian Perdagangan yang bertugas menjalankan beberapa sistem perdagangan yang mampu mempertinggi daya saing melalui 3 (tiga) bidang kegiatan, yakni Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang (PL).

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mempunyai tujuan antara lain meningkatkan daya saing komoditi di pasar dalam dan luar negeri, menciptakan pembentukan dan referensi harga yang transparan, meningkatkan pemanfaatan SRG sebagai alternatif pembiayaan, dan meningkatkan pendapatan petani/keompok tani dan UKM melalui efisiensi pemasaran komoditi.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi berkomitmen dengan visi ***“Terwujudnya Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) yang mendukung efisiensi pasar komoditi.”*** Badan Pengawas Perdagangan mempunyai misi antara lain:

- Mengembangkan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai instrument lindung nilai dan pembentukan harga yang transparan yang dapat dijadikan sebagai referensi harga;
- Mengembangkan SRG sebagai alternatif pembiayaan yang mudah diakses oleh pelaku usaha terutama petani dan UKM;
- Mengembangkan PL sebagai mekanisme pembentukan harga yang transparan dan terbuka serta akses pemasaran produk hasil komoditi primer.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum melalui pengembangan teknologi informasi dan koordinasi dengan instansi penegak hukum secara berkelanjutan;

- Meningkatkan iklim usaha yang kondusif melalui amandemen UU No.32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diubah melalui UU No.10/2014 dan UU No.9/2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana diubah melalui UU No.9/2014;
- Meningkatkan efektifitas kelembagaan dan peningkatan pelayanan prima melalui penyederhanaan prosedur dan penerapan teknologi informasi;
- Meningkatkan peran serta pelaku usaha/petani dalam skema RG;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur dan pelaku usaha yang berkompetensi;
- Melakukan revitalisasi PL melalui penyempurnaan peraturan, pengembangan pasar fisik terorganisir dan sarana sistem teknologi informasi;
- Mewujudkan kebijakan sistem distribusi yang efektif melalui pembangunan sarana dan prasarana perdagangan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh satu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Lainnya berasal dari ujian profesi calon wakil pialang berjangka diakui berdasarkan lolos/tidaknya seleksi administratif dan telah membayar biaya ujian;
 - Pendapatan Jasa Lainnya berasal dari ijin pembukaan kantor cabang pialang berjangka yang diakui setelah persyaratan disetujui dan telah membayar biaya jasa perijinan;
 - Pendapatan Jasa Lainnya berasal dari ijin wakil pialang berjangka dan sertifikat pendaftaran pedagang berjangka diakui setelah terbit sertifikat, SK, dan telah membayar biaya perijinan ;

- Pendapatan Jasa lainnya berupa denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan pelaku usaha PBK diakui pada saat dikeluarkannya surat pengenaan/penetapan sanksi administratif berupa denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPATGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang

dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

*Penyusutan
Aset Tetap*

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, perbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

Pendapatan

Rp.1.515.141.487,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.515.141.487,- atau mencapai 137,74 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.100.000.000. Pendapatan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terdiri dari Pendapatan Jasa Lainnya, Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan	-	33.699.999	-
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	700.000.000	1.168.000.000	166,86
Pendapatan Denda	400.000.000	39.800.000	9,95
Pendapatan Lain-lain	-	273.641.488	-
Jumlah	1.100.000.000	1.515.141.487	137,74

Realisasi Pendapatan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 50,30 persen dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan kenaikan Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum sebesar Rp. 639.500.000 atau 54,75 persen dan Pendapatan Lain-lain sebesar Rp 167.778.535 atau 61,31 persen.

Perbandingan Realisasi Pendapatan 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BM	33,699,999	-	100.00
Pendapatan Lain-lain	273,641,488	105,862,953	61.31
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	1,168,000,000	528,500,000	54.75
Pendapatan Denda	39,800,000	118,611,897	(66.45)
Jumlah	1,515,141,487	752,974,850	50.30

Realisasi Belanja

Negara

Rp47.851.419.342

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp47.851.419.342 atau 97,85% dari anggaran belanja sebesar Rp48.919.597.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Tahun 2022

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	23,757,201,000	23,155,037,014	97.47
Belanja Barang	24,509,602,000	24,065,006,013	98.19
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	652,794,000	649,701,640	99.53
Total Belanja Kotor	48,919,597,000	47,869,744,667	97.85
Pengembalian Belanja	-	18,325,325	
Jumlah	48,919,597,000	47,851,419,342	97.82

Dibandingkan dengan TA 2021, Realisasi Belanja TA 2022 mengalami penurunan sebesar 0.14% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan fokus dan prioritas belanja pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	23,155,035,495	20,034,540,963	13.48
Belanja Barang	24,046,682,207	25,744,172,305	(6.59)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	
Belanja Modal	649,701,640	2,139,746,475	(69.64)
Jumlah	47,851,419,342	47,918,459,743	(0.14)

Belanja Pegawai
Rp23.155.035.495

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp23.155.035.495 dan Rp20.034.540.963. Realisasi belanja Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 13.48 persen dari Tahun 2021. Hal ini disebabkan terdapat kenaikan pembayaran tunjangan sehubungan jabatan fungsional yang telah ditetapkan kepada beberapa pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	10,350,411,317	9,219,548,861	10.93
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Lembur	167,293,000	-	100.00
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	12,637,332,697	10,815,187,900	14.42
Jumlah Belanja Kotor	23,155,037,014	20,034,736,761	13.48
Pengembalian Belanja Pegawai	(1,519)	(195,798)	(99.22)
Jumlah Belanja	23,155,035,495	20,034,540,963	15.58

Belanja Barang
Rp24.046.682.207

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp24.046.682.207 dan Rp25.744.172.305. Realisasi Belanja Barang Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 6,59% dari Realisasi Belanja Barang Tahun 2021. Hal ini antara lain disebabkan oleh perubahan fokus dan prioritas belanja pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19.

Perbandingan Belanja Barang Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	3,928,466,562	4,165,209,002	(5.68)
Belanja Barang Non Operasional	2,684,778,571	3,002,303,202	(10.58)
Belanja Barang Persediaan	1,538,939,411	2,659,344,744	(42.13)
Belanja Jasa	5,812,125,926	7,518,730,873	(22.70)
Belanja Pemeliharaan	820,846,620	1,801,051,529	(54.42)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	9,023,264,923	6,598,117,955	36.76
Belanja Perjalanan Luar Negeri	256,584,000	-	-
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	24,065,006,013	25,744,757,305	(6.52)
Pengembalian Belanja	(18,323,806)	(585,000)	-
Jumlah Belanja	24,046,682,207	25,744,172,305	(6.59)

Belanja Bantuan
Sosial Rp0

B.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Modal
Tanah Rp0

B.6 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Tanah tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pengurusan dan Pematangan Tanah	-	-	-
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Modal Peralatan
dan Mesin
Rp377.544.140

B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 adalah sebesar Rp377.544.140 mengalami penurunan sebesar (55,97) persen bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 sebesar Rp857.512.475. Hal ini disebabkan terdapat penurunan pada Pengadaan Peralatan dan Mesin berupa alat kantor, alat rumah tangga, komputer jaringan dan peralatan jaringan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Alat Kantor	-	113.004.000	(100,00)
Alat Rumah Tangga		55.045.000	(100,00)
Alat Studio		49.905.000	0,00
Alat Komunikasi		15.910.000	0,00
Komputer Unit	114.100.000	524.825.000	(78,26)
Peralatan Komputer	41.644.140	97.348.475	(57,22)
Komputer Jaringan		-	#DIV/0!
Peralatan Jaringan		-	#DIV/0!
Kursi Zeis	150.400.000		
Meja Rapat	41.500.000		
Sofa	29.900.000		
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		1.475.000	100,00
Jumlah Belanja Kotor	377.544.140	857.512.475	(55,97)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	377.544.140	857.512.475	(55,97)

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0

B.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal berupa Gedung dan Bangunan pada Tahun 2022 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan Tahun 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	-

Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan Rp0

B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun 2022 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Tahun 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun)
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Modal
Lainnya
Rp272.157.500

B.10 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp272.157.500 dan Rp1.282.234.000. Realisasi Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 53.24 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal lainnya Tahun 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	0	700,235,000	(100.00)
Belanja Penambahan Nilai Aset tetap lainnya	272,157,500	581,999,000	(53.24)
Jumlah Belanja Kotor	272,157,500	1,282,234,000	(78.77)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	272,157,500	1,282,234,000	(78.77)

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.0,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TA 2022	TA 2021
Kas Bendahara Pengeluaran	-	-
Uang Tunai	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp.0,-*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	TA 2022	TA 2021
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Uang Tunai	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp.0,-*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	TA 2022	TA 2021
	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang Masih harus Diterima Rp0

C.4 Pendapatan yang Masih harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan yang masih diterima merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Pendapatan yang Masih harus Diterima disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Masih Harus Diterima

Uraian	TA 2022	TA 2021
	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Bukan Pajak (Netto) Rp13.014.544

C.5 Piutang Bukan Pajak (Netto)

Saldo Piutang Bukan Pajak (Netto) tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp13.014.544 dan Rp21.020.901. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Persediaan **C.6 Persediaan**
Rp2.761.804.342

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp2.761.804.342 dan Rp33.660.403.996.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	TA 2022	TA 2021
Barang Konsumsi	277,311,928	623,804,710
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	755,815,754	9,603,089,858
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	1,728,676,660	23,433,509,428
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	2,761,804,342	33,660,403,996

Saldo Persediaan sebesar Rp2.761.804.342 tersebut berdasarkan hasil stock opname tanggal 31 Desember 2022 nomor PL.06/610.1/Bappebti.1/BA-SO/12/2022.

Tagihan TP/TGR **C.7 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**
Rp.0,-

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	TA 2022	TA 2021
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
Jumlah		-	-

C.8 Tagihan Penjualan Angsuran

TPA
Rp.0,-

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA

No	Debitur	TA 2022	TA 2021
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
Jumlah		-	-

C.9 Tanah

Tanah
Rp.0,-

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2022	0

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	-	-	-
2	-	-	-

Peralatan dan Mesin
Rp21.833.905.248

C.10 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp21.833.905.248 dan Rp22.243.883.108. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	22.243.883.108
Mutasi tambah:	
Pembelian	476.434.140
Reklasifikasi Masuk	143.800.000
Mutasi kurang:	-
Mutasi Kurang	(242.690.000)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(787.522.000)
Saldo per 31 Desember 2022	21.833.905.248
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-19.824.545.972
Nilai Buku per 31 Desember 2022	2.009.359.276

Mutasi transaksi pembelian peralatan dan mesin berupa:

- Pembelian Alat Kantor Lainnya senilai Rp98.890.000,-;
- Pembelian Meubelair senilai Rp71.400.000,-;
- Pembelian Alat Kedokteran Bedah senilai Rp150.400.000,-;
- Pembelian Personal Komputer senilai Rp143.800.000,-;
- Pembelian Peralatan Personal Komputer Rp11.944.140,-.

Reklafikasi Masuk diantaranya:

- Komputer Unit Lainnya Rp. 93.250.000;
- Peralatan Jaringan Rp. 20.850.000;
- Peralatan Komputer Lainnya Rp. 29.700.000.

Reklafikasi Keluar diantaranya:

- Komputer Unit Lainnya Rp. 93.250.000;
- Peralatan Jaringan Rp. 20.850.000;
- Peralatan Komputer Lainnya Rp. 29.700.000;
- Alat Kantor Lainnya Rp. 98.890.000.

Penghentian Aset dari Penggunaan diantaranya:

- Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Rp. 4.386.000;
- Alat Kantor Lainnya Rp. 6.270.000;
- Meubel Air Rp. 757.781.000
- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp. 19.085.000.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp.0,-

C.11 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	-
Mutasi tambah:	
Pembangunan tambahan ruang kelas	-
Mutasi kurang:	-
Penghentian Aset dari Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2022	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	-

Rincian Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp475.090.000

C.12 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp475.090.000 dan Rp475.090.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	475,090,000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2022	475,090,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(475,090,000)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya

Rp146.055.961

C.13 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp146.055.961 dan Rp146.055.961. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Aset Tetap Lainnya:

- | | | |
|----|-----------------------------|----------------|
| 1. | Bahan Perpustakaan Tercetak | Rp141.055.961; |
| 2. | Barang Bercorak Kesenian | Rp 5.000.000. |

Konstruksi Dalam

Pengerjaan Rp0,-

C.14 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. yang merupakan pembangunan gedung tempat kerja berupa perpustakaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(20.299.635.972)

C.15 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp(20.299.635.972) dan Rp(19.888.043.721). Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	21.833.905.248	19.824.545.972	2.009.359.276
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	475.090.000	475.090.000	-
4	Aset Tetap Lainnya	146.055.961	-	146.055.961
	Jumlah	22.455.051.209	20.299.635.972	2.155.415.237

Aset Lain-Lain
Rp5.943.948.760

C.17 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp5.943.948.760 dan Rp5.978.264.760. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	5.978.264.760
<i>Mutasi tambah:</i>	
- Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
<i>Mutasi kurang:</i>	
- Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(34.316.000)
Saldo per 31 Desember 2022	5.943.948.760
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi s.d. 31 Desember 2022	(5.699.756.196)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	244.192.564

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(9.376.356.896)

C.18 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp(9.376.356.896) dan Rp(9.403.648.717). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	13.668.664.870	3.676.600.700	9.992.064.170
Aset Lain-lain	5.943.948.760	5.699.756.196	244.192.564
Jumlah	19.612.613.630	9.376.356.896	10.236.256.734

Uang Muka dari KPPN
Rp.0,-

C.19 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp.0,-

C.20 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
-	-	-

Pendapatan Diterima di
Muka
Rp.0,-

C.21 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Jasa Perdagangan Berjangka Komoditi yang tidak dapat dirinci jenis penerimaannya. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah
Total	-

Ekuitas
Rp15.166.490.857,-

C.22 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp15.166.490.857 dan Rp46.629.533.658 . Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNB
Rp1.218.222.356

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp1.218.222.356 dan Rp642.111.897. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Perizinan di Bidang Perdagangan	1.168.000.000	528.500.000	121,00
Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Perdagangan	33.200.000	112.400.000	(70,46)
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	1.211.897	-
Pendapatan Lain-lain	17.022.356	-	-
Jumlah	1.218.222.356	642.111.897	89,72

Pendapatan Jasa Lainnya merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Pendapatan atas Denda Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK, Ujian Profesi, dan Ijin Kantor Cabang Pialang Berjangka (IKCPB), dan saldo per 31 Desember 2022 di Rekening Bendahara Penerima PNB. Terdapat Pendapatan Lain-lain sebesar Rp17.022.356, Pendapatan Perizinan di Bidang Perdagangan sebesar Rp1.168.000.000, dan Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Perdagangan sebesar Rp33.200.000

Beban Pegawai
Rp23.142.020.951

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp23.142.020.951 dan Rp20.023.864.035. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	6.772.737.060	6.283.012.460	7,79
Beban Tunjangan-Tunjangan	15.296.507.891	12.721.667.575	20,24
Beban Uang Makan	1.072.776.000	1.019.184.000	5,26
Beban Lembur	-	-	
Jumlah	23.142.020.951	20.023.864.035	15,57

Beban Persediaan
Rp 1.847.461.529

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 1.847.461.529 dan Rp2.620.920.484. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	1.778.601.529	2.620.920.484	(32,14)
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	68.860.000	-	-
Jumlah Beban Persediaan	1.847.461.529	2.620.920.484	(29,51)

Beban Jasa
Rp12.423.535.059

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp12.423.535.059 dan Rp14.685.658.077. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	3.142.388.534	3.258.532.700	(3,56)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14.185.300	25.129.000	(43,55)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	321.540.000	379.640.000	(15,30)
Beban Barang Operasional Lainnya	398.136.400	429.776.499	(7,36)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	52.216.328	72.130.803	(27,61)
Beban Bahan	2.054.427.944	2.085.033.528	(1,47)
Beban Honor Output Kegiatan	360.884.000	540.410.000	(33,22)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	264.527.266	348.542.674	(24,10)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	4.803.361	28.317.000	(83,04)
Beban Langganan Telepon	13.804.985	15.580.715	(11,40)
Beban Jasa Konsultan	142.800.000	287.490.000	(50,33)
Beban Sewa	1.149.531.656	1.232.669.600	(6,74)
Beban Jasa Profesi	1.746.600.000	3.184.915.000	(45,16)
Beban Jasa Lainnya	2.720.242.849	2.385.002.652	14,06
Beban Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19	37.446.436	412.487.906	(90,92)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	-	
Jumlah	12.423.535.059	14.685.658.077	(15,40)

Beban
Pemeliharaan
Rp854.071.284

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp854.071.284 dan Rp1.881.412.609. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	752.996.620	801.073.909	(6,00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	67.850.000	999.977.620	(93,21)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	33.224.664	80.361.080	(58,66)
Jumlah	854.071.284	1.881.412.609	(54,60)

Beban Perjalanan
Dinas
Rp9.263.361.117

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp9.263.361.117 dan Rp6.598.117.955. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	6.831.755.117	5.214.926.455	31,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	990.500.000	803.745.000	23,24
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	361.815.000	356.721.500	1,43
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	822.707.000	222.725.000	269,38
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	256.584.000	0	
Jumlah	9.263.361.117	6.598.117.955	40,39

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat
Rp30.557.573.872*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp30.557.573.872 dan Rp9.854.479.657. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan	-	6.917.659.272,00	(100,00)
Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan	30.552.827.872,00	2.936.820.385,00	940,34
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	4.746.000,00		
Jumlah	30.557.573.872,00	9.854.479.657,00	210,09

*Beban Bantuan
Sosial Rp0,-*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Belanja Modal BLU	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp.1.206.138.430

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.206.138.430 dan Rp4.798.280.605. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.199.114.251	1.270.062.472	(5,59)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	8.916.608	-
Jumlah Penyusutan	1.199.114.251	1.278.979.080	(6,24)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	3.502.914.000	-
Beban Amortisasi Software	7.024.179	16.387.525	(57,14)
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	0,00
Jumlah Amortisasi	7.024.179	3.519.301.525	(99,80)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.206.138.430	4.798.280.605	-74,86

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp.-
589.275

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp(589.275) dan Rp(1.312). Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang PNPB	-527.000		
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-62.275		
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek	-	(1.312)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang	-	-	-
Jumlah	(589.275)	(1.312)	44814,25

Beban Lain-lain
Rp.0,-

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.275.308.955,-

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	33.699.999	-	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	241.608.956	105.145.449	129,79
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	275.308.955	105.145.449	161,84

Pos Luar Biasa
Rp.0,-

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp46.629.533.658

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp46.629.533.658 dan Rp58.909.339.529.

Defisit LO

Rp(77.800.041.656)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp(77.800.041.656) dan Rp(59.715.474.764) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai

Aset Rp.0,-

E.4 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan penyesuaian nilai perolehan persediaan karena nilai persediaan yang dilaporkan pada tanggal neraca menggunakan harga pembelian terakhir, sementara persediaan tersebut dibeli dengan harga satuan yang berbeda. Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp.0,-

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Atas

Reklasifikasi

Rp721.000

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Reklasifikasi Masuk/Reklasifikasi Keluar pada update Aplikasi Persediaan yang terbaru menghasilkan akun koreksi atas Reklasifikasi. Koreksi Atas Reklasifikasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp721.000 dan Rp0.

Selisih Revaluasi
Aset Rp.0,-

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset adalah selisih yang diakibatkan oleh penilaian kembali aset tetap. Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp.0,-

E.4.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai perolehan aset pada periode sebelumnya sehubungan dengan adanya pengembalian belanja modal dari tahun anggaran yang lalu. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Lain-lain
Rp.0,-

E.4.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi atas nilai ekuitas yang disebabkan oleh selain koreksi nilai persediaan, revaluasi aset tetap dan koreksi nilai aset non revaluasi. Koreksi lain-lain untuk periode per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0 dan Rp364.000

Transaksi Antar
Entitas
Rp46.336.277.855

E.5 Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp46.336.277.855 dan Rp47.435.304.893. Jumlah tersebut terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	Rp47.851.419.342
Diterima dari Entitas Lain	Rp (1.515.141.487)
Transfer Masuk	0
Jumlah	Rp46.336.277.855

Ekuitas Akhir
Rp15.166.490.857

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp15.166.490.857 dan Rp46.629.533.658.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca pada satuan kerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Pada Satuan Kerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terdapat pengungkapan-pengungkapan lainnya baik pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang masih berbasis kas maupun pada Neraca dan Laporan Operasional (LO) yang berbasis akrual yang termuat dalam jurnal penyesuaian. Berikut merupakan penjelasan-penjelasan yang rinciannya termuat dalam lampiran laporan keuangan ini.

F.2.1 Laporan Realisasi Anggaran

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting pada tanggal periode pelaporan pada satuan kerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang berhubungan dengan realisasi anggaran.

F.2.2 Jurnal Penyesuaian Neraca

Tidak terdapat Jurnal Penyesuaian terkait dengan transaksi akrual pada Neraca Satuan Kerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi selama periode Pelaporan.

F.2.3 Jurnal Penyesuaian

Terdapat Jurnal Penyesuaian terkait dengan transaksi akrual pada Neraca, Neraca Percobaan, maupun Laporan Operasional (LO) Satuan Kerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Rinciannya adalah sebagai berikut.

1. Jurnal penyisihan piutang atas Tunjangan Kinerja yang dikembalikan ke kas negara per 1 Oktober 2022 sebesar Rp53.630 berupa Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya (594212) terhadap Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya (116212);

2. Jurnal koreksi Penyisihan Piutang Tak tertagih atas piutang PNBP per 1 Oktober 2022 sebesar Rp 523.000 berupa Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang PNBP (116211) terhadap Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP (594211);
3. Jurnal koreksi pendapatan denda pelanggaran di bidang perdagangan per 1 Oktober 2022 sebesar Rp5.800.000 berupa Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Perdagangan (425813) terhadap Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (115211);
4. Jurnal balik kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja di per 1 Oktober 2022 sebesar Rp15.010.176 berupa Pendapatan TAYL (425911) terhadap Piutang Lainnya (115212);
5. Jurnal Penyesuaian Saldo Piutang PNBP per 1 Oktober 2022 sebesar Rp6.600.000 berupa Kas di Bendahara Penerimaan (111711) terhadap Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang PNBP(116211);
6. Jurnal Balik Saldo Piutang PNBP per 1 Oktober 2022 sebesar Rp6.600.000 berupa Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang PNBP(116211) terhadap Kas di Bendahara Penerimaan (111711).
7. Jurnal Penyesuaian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya Per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.645 berupa Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya (116212) terhadap Belanja Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lainnya (594212);
8. Jurnal Penyesuaian penghapusan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – PNBP Per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.000 berupa Penyisihan Piutang Tak Tertagih – PNBP (116211) terhadap Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP (594211);
9. Jurnal Balik Saldo Piutang PNBP sebesar Rp800.000, namun berdasarkan hasil rekonsiliasi Piutang PNBP Bappebti, Piutang PNBP per 31 Desember 2022 adalah Rp0, maka dibuat jurnal balik sebesar Rp.800.000 per 31 Desember 2022 berupa Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Perdagangan (425813) terhadap Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (115211);
10. Jurnal Penyesuaian kelebihan Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2022 sebesar Rp13.014.544,-, maka di buat jurnal penyesuaian per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.014.544,- berupa Piutang Lainnya (115212) terhadap Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) (512411);

11. Jurnal Koreksi Belanja Dibayar Di Muka Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 55.500.000,- berupa Belanja Jasa Lainnya (522191) terhadap Belanja Barang yang Dibayar di Muka (prepaid) (114112);
12. Jurnal Penyesuaian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lainnya Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 65.073,- berupa Belanja Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lainnya (594212) terhadap Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya (116212);
13. Jurnal Penyesuaian Piutang atas Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember 2022 dan dikompensasikan pada periode berikutnya Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 65.073,- berupa Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNB (116211); terhadap Belanja Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lainnya (594212);
14. Jurnal Koreksi atas Kelebihan Tunjangan Kinerja Desember 2022 Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 65.073,- berupa Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya (116212); terhadap Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNB (116211);